

ANALISIS MASALAH WILAYAH: STUDI KASUS MASALAH PEMBANGUNAN WATERFRONT DI KABUPATEN SAMBAS

Yulius Yohanes¹, Sitha Anggraini Nurhasfiyati², Renanda Ayu Nandira³, Lili Tan⁴, Moehammad Rizal⁵, Erwin⁶

Abstrak: Analisis masalah wilayah merupakan langkah penting dalam memahami tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Studi kasus masalah pembangunan waterfront di Kabupaten Sambas menjadi fokus penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang relevan dengan pengembangan wilayah tersebut. Melalui pendekatan analisis deskriptif dan eksploratif, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah kritis yang dihadapi dalam pembangunan waterfront di Kabupaten Sambas, seperti perubahan lingkungan, infrastruktur yang belum memadai, serta keterlibatan aktor-aktor terkait. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek geografis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah-masalah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambil keputusan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan waterfront yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi Kabupaten Sambas serta masyarakatnya.

Kata kunci: Waterfront; Kebijakan; Korupsi.

***Abstract:** Analysis of regional issues is an important step in understanding the development challenges facing a region. Case studies on waterfront development issues in Sambas Regency are the focus of research to gain a deeper understanding of issues relevant to the development of the region. Through a descriptive and exploratory analysis approach, this study identified several critical problems encountered in the construction of waterfront in Sambas Regency, such as environmental changes, inadequate infrastructure, and the involvement of related actors. The analysis is carried out in consideration of geographical, social, economic, and institutional aspects to formulate appropriate policy recommendations to address these issues. The results of this research are expected to be the basis for decision-makers in planning and implementing sustainable waterfront development and positively affecting Sambas Regency and its people.*

***Keywords:** Waterfront; Kebijakan; Korupsi.*

PENDAHULUAN

Dalam proses peningkatan kegiatan ekonomi daerah, infrastruktur adalah bagian yang sangat penting. Suatu pembangunan tidak dapat berjalan jika infrastruktur atau prasarana kurang baik. Aspek kehidupan ataupun ekonomi mempunyai prasarana tersendiri menjadi yang utama pada berbagai kegiatan. Berdasarkan pengalaman yang ada pembangunan sering kala kurang efisien dan kurang efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan daerah, dan juga berbagai dampak sosial yang ditimbulkan dari penyimpangan teknis maupun non teknis.

Pemerintah Kabupaten Sambas terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), dengan terbitnya Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang maka kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pindah dari Kota Singkawang ke Kota Sambas.

Geografis Kabupaten Sambas memiliki luas daratan 6.589,30 Km² dengan dikelilingi perairan laut seluas 1.467,84 Km². Kabupaten Sambas terletak pada 2008 sampai dengan 2033 Lintang Utara dan 108004 sampai dengan 108039 Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Sambas terbagi atas 19 kecamatan yang terdiri dari Selakau, Pemangkat, Jawai, Tebas, Sambas, Sejangkung, Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar, Galing, Subah, Tekarang, Semparuk, Sebawi, Sajad, Jawai Selatan, Tangaran, Selakau Timur dan Salatiga. Wilayah Kabupaten Sambas secara keseluruhan berbatasan dengan: 1) Bagian utara berbatasan dengan wilayah Serawak Malaysia; 2) Bagian selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang; 3) Bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna; 4) Bagian timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkayang dan wilayah Serawak Malaysia.

Pada awalnya, daerah pertemuan tiga sungai di Sungai Sambas Kecil merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi lokasi di mana Kerajaan Sambas pertama kali berdiri pada masa pemerintahan Sultan Sambas kedua, yaitu Raden Bima yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin (1668-1708), terutama di Muara Ulakan (pertemuan tiga sungai di Sungai Sambas Kecil). Faktor-faktor sejarah dan keberagaman etnis yang ada di daerah ini membentuk karakter dan ciri-ciri yang beragam, yang memberikan identitas unik bagi wilayah Sungai Sambas secara keseluruhan. Hingga saat ini, kondisi tata ruang di sepanjang pertemuan Sungai Sambas Kecil masih terlihat tidak teratur dengan baik. Ini terlihat dari lokasi dan posisi bangunan yang berada di tepi sungai yang tidak sesuai dengan regulasi pemerintah setempat. Terkait dengan hal ini, pengaturan wilayah sepanjang sungai mengharuskan adanya zona perbatasan minimal 10 meter, atau penentuan zona tersebut berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomi oleh pejabat yang berwenang. Bahkan, ada beberapa rumah yang berada di atas sungai (rumah panggung). Oleh karena itu, diperlukan studi analisis urban untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta mengambil pendekatan untuk menyusun konsep rencana penataan wilayah waterfront city di Kota Sambas sebagai destinasi wisata. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dalam merumuskan pedoman penataan wilayah waterfront city di Kota Sambas.

Pembangunan waterfront di area Istana Alwatzikhobilah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga mengalami masalah. Dalam investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar, empat individu telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Kejati Muhammad Yusuf, menyatakan bahwa keempat tersangka terdiri dari seorang pegawai negeri sipil (ASN) dengan inisial ES dan tiga orang lainnya dari sektor swasta, yaitu J, S, H, dan M. Penetapan status tersangka terhadap empat individu tersebut dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti berdasarkan hasil penyelidikan perkara. Proyek ini diduga bermasalah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana anggaran pembangunan. Kelima tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Proyek ini dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 03.09.03/FS-03/SP/WTF. SMB/CK-PBL/2022/DPUPR tanggal 21 Juni 2022 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp 8.826.000, dengan menggunakan dana yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat. Selama pelaksanaan proyek, ditemukan bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan metode yang diatur dalam kontrak sehingga tanah dan

turap yang sudah ada sebelumnya mengalami longsor dan roboh. Akibatnya, pekerjaan tersebut dihentikan dan realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 45,53%. Karena terjadinya longsor di lokasi proyek, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian keuangan bagi negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah dan akibat dari kasus waterfront sambah yang diduga penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bersangkutan sehingga menyebabkan terhambatnya proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

Implikasi yang di sebabkan oleh kasus korupsi waterfront sambah ini adalah prosedur yang tidak sesuai saat pengerjaan sehingga membuat tanah dan turap existing longsor sehingga membuat pemutusan kontrak kerja. tentunya dalam kasus ini kerugian negara tentu menjadi masalah utama. Dana yang di glontorkan untuk pembangunan waterfront ini adalah sekitar Rp8.826.828.000 dan kerugian yang di taksir sekitar 1,8 miliar, dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat. tak hanya itu impikasi yang diakibatkan oleh kasus ini berdampak pula pada mesjid di daerah sekitar waterfront tersebut, yaitu Mesjid Jami. Pondasi mesjid Jami mengalami penurunan sehingga mengalami banjir. Selain itu jalan di sekitar waterfront pun mengalami kerusakan akibat dilalui oleh kendaraan bermuatan berat.

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. (Marini 2016).

Dalam konsep dan definisi infrastruktur, infrastruktur umumnya mencakup fasilitas-fasilitas publik yang diperuntukkan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk melayani kepentingan masyarakat (dalam kasus ketika mekanisme pasar tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut) dan untuk mendukung serta mendorong aktivitas ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Infrastruktur yang disediakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap wilayah agar dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. (NSS, Suryawardana, and Triyani 2015).

Infrastruktur dalam berbagai bentuknya, adalah tulang punggung yang mendukung perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dari jaringan jalan raya yang membentang melintasi negeri hingga jaringan listrik yang mengalirkan energi ke rumah-rumah kita, dari pelabuhan yang menghubungkan kita dengan pasar global hingga sistem komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi instan, infrastruktur adalah pondasi yang memungkinkan kehidupan modern seperti yang kita kenal saat ini.

Infrastruktur yang mencakup jaringan transportasi, sumber daya energi, telekomunikasi, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya, adalah tulang punggung ekonomi suatu negara. Ini adalah fondasi yang memungkinkan mobilitas barang dan manusia, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta pertumbuhan bisnis dan industri. Di Indonesia, meningkatkan infrastruktur adalah kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah lama menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Namun, sementara kebutuhan akan infrastruktur yang kuat dan modern semakin mendesak, menghadapinya bukanlah tugas yang mudah. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembiayaan, perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan

infrastruktur. Masalah pendanaan yang terbatas, regulasi yang kompleks, tantangan lingkungan, dan keberlanjutan adalah beberapa dari banyak aspek yang perlu diperhatikan secara cermat.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita. Pertumbuhan inklusif merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan global mengenai Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan pemerataan, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Infrastruktur berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah Studi Pustaka. Studi Pustaka yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber baik berupa data dan informasi yang didapatkan dari beberapa artikel, jurnal, buku, website dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembangunan waterfront Istana Alwatzikhoebillah Kabupaten Sambas. Setelah menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memperoleh informasi, langkah selanjutnya dengan mengkaji beberapa sumber yang telah ditemukan untuk diolah menjadi satu bahan yang berguna dalam penulisan artikel ini.

Studi pustaka merupakan sebuah proses penting dalam tahap persiapan penelitian yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian yang diteliti. Langkah pertama dalam studi pustaka adalah mengidentifikasi dengan jelas topik penelitian yang akan dijalankan. Setelah topik penelitian teridentifikasi, peneliti kemudian melakukan pencarian literatur yang relevan melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, tesis, dan sumber-sumber daring. Setelah pencarian dilakukan, peneliti melakukan seleksi literatur untuk menentukan literatur yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk dimasukkan dalam studi pustaka. Tahap selanjutnya melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang dipilih, di mana peneliti membaca dan memahami isi literatur secara mendalam, serta mengidentifikasi konsep, temuan, dan argumen yang relevan dengan topik penelitian. Akhirnya, hasil analisis literatur disusun dalam bentuk tulisan atau laporan yang jelas dan sistematis, yang membantu membangun dasar pengetahuan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Dengan melakukan studi pustaka yang cermat, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang literatur terkait dan membangun dasar teoritis atau konseptual yang solid.

Studi pustaka tidak hanya sekadar pencarian dan pengumpulan literatur terkait dengan topik penelitian, tetapi juga merupakan sebuah proses analisis yang mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang ditemukan. Dalam proses ini, peneliti tidak hanya membaca literatur secara sekilas, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kualitas, relevansi, dan keandalan informasi yang terdapat dalam literatur tersebut. Analisis literatur ini membantu peneliti untuk memahami berbagai pendekatan, teori, metodologi, dan temuan yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam bidang yang sama atau terkait.

Dengan demikian, studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih ada, mengevaluasi kerangka teoritis yang telah digunakan, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih terarah. Selain itu, studi pustaka juga membantu peneliti untuk memperluas pemahaman mereka tentang topik penelitian, memperoleh wawasan baru, dan mengembangkan sudut pandang yang lebih luas. Dengan demikian, studi pustaka tidak hanya menjadi langkah awal dalam proses penelitian, tetapi juga merupakan sebuah proses yang terus berlanjut selama seluruh tahap penelitian, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memandu dan mengarahkan penelitian secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Infrastruktur dalam berbagai bentuknya, adalah tulang punggung yang mendukung perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dari jaringan jalan raya yang membentang melintasi negeri hingga jaringan listrik yang mengalirkan energi ke rumah-rumah kita, dari pelabuhan yang menghubungkan kita dengan pasar global hingga sistem komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi instan, infrastruktur adalah pondasi yang memungkinkan kehidupan modern seperti yang kita kenal saat ini. Infrastruktur yang mencakup jaringan transportasi, sumber daya energi, telekomunikasi, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya, adalah tulang punggung ekonomi suatu negara. Ini adalah fondasi yang memungkinkan mobilitas barang dan manusia, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta pertumbuhan bisnis dan industri. Di Indonesia, meningkatkan infrastruktur adalah kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah lama menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Namun, sementara kebutuhan akan infrastruktur yang kuat dan modern semakin mendesak, menghadapinya bukanlah tugas yang mudah. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembiayaan, perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur. Masalah pendanaan yang terbatas, regulasi yang kompleks, tantangan lingkungan, dan keberlanjutan adalah beberapa dari banyak aspek yang perlu diperhatikan secara cermat.

Pentingnya infrastruktur dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi, para ahli infrastruktur sepakat bahwa dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemeran utama dalam sektor infrastruktur seharusnya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembangunan infrastruktur juga sepatutnya melibatkan pihak swasta dan masyarakat demi tercapainya pembangunan berkesinambungan. Untuk itu perlu pendekatan lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah maupun wilayah.

Isu pembiayaan infrastruktur oleh pemerintah merupakan perbincangan yang sangat menarik dikalangan para ahli. Diakui oleh para ahli bahwa pemerintah memang menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan infrastruktur, dimana keterbatasan dana menyebabkan tidak memungkinkan pemerintah mengandalkan metode pembiayaan konvensional untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat.

Kabupaten Sambas, dengan keindahan alamnya yang memukau dan potensi ekonominya yang besar, adalah salah satu wilayah yang menjanjikan di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Terletak di pesisir barat pulau Kalimantan, Kabupaten Sambas memiliki kekayaan alam yang melimpah, dari hutan hujan tropis hingga pesisir

yang indah, yang memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Sebagai pusat pertumbuhan kota yang didominasi oleh kawasan perumahan atau permukiman penduduk, diperlukan kebijakan pengembangan yang mengikuti dan menghormati nilai budaya masyarakat lokal. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi mereka. Kawasan waterfront city termasuk dalam kriteria kawasan yang strategis dan memiliki potensi ekonomi yang signifikan, yang jika berhasil dikembangkan, akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan.

Hasil analisis survei mengenai kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa sebagian besar objek dan atraksi wisata memiliki nilai yang baik hingga sangat baik, kecuali satu objek, yaitu kafe, yang mendapat penilaian rendah. Saat ini, keberadaan kafe sebagai destinasi wisata kuliner masih terbatas pada kafe yang terletak di rumah-rumah penduduk sekitar sungai dan pedagang kaki lima. Situasi ini memberikan peluang besar bagi pengembangan kawasan waterfront city di Kota Sambas melalui penataan yang lebih baik, terutama dalam rangka pengembangan kawasan wisata budaya. Upaya ini melibatkan eksplorasi lebih lanjut terhadap budaya lokal yang ada sebelumnya serta mengintegrasikan keberadaan budaya dengan lingkungan alaminya.

Namun, di tengah potensi besar ini, Kabupaten Sambas juga menghadapi sejumlah permasalahan serius terkait dengan pembangunan infrastrukturnya. Infrastruktur yang kuat adalah fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun begitu, permasalahan seperti pendanaan yang terbatas, perencanaan yang belum matang, serta tantangan lingkungan dan sosial menjadi hambatan dalam upaya untuk mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan wilayah ini.

Istana Alwatzikhoebillah merupakan peninggalan berharga masa lalu, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan ekonomi lokal dan memperkaya pengalaman wisatawan. Namun, di balik potensi besar ini, pembangunan waterfront Istana Alwatzikhoebillah di Kabupaten Sambas juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Pembangunan waterfront Istana Alwatzikhoebillah adalah suatu upaya yang kompleks yang mencakup aspek budaya, sejarah, ekonomi, dan lingkungan. Ini melibatkan pelestarian situs bersejarah, pengembangan fasilitas wisata, pengelolaan lingkungan, dan tantangan sosial-ekonomi.

Gambar 1. Waterfront yang terlihat rusak dan patah



Sumber: <https://insidepontianak.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG-20230201-WA0011696x320.jpg>

Pembangunan Kawasan Waterfront Istana Alwatzikhobillah Kabupaten Sambas, merupakan proyeknya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2022. Pengerjaan pembangunan Kawasan Waterfront Sambas, di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalbar, tepatnya di depan Istana Alwatzikhoebillah Sambas, terindikasi tidak dilanjutkan dengan beberapa penyebab diantaranya yaitu :

1. Kontraktor Yang Mengerjakan Tidak Sesuai Prosedur

Pada saat pengerjaan proyek material yang digunakan dalam pembangunan waterfront diminta agar material yang ada bisa dilewatkan melalui jalur air, namun yang terjadi dilapangan material ditumpuk di tepi jalan, sehingga jalan disekitar proyek tersebut ada ambruk dan rusak parah. Akibat pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai prosedur sehingga mengalami kesalahan teknis yang menyebabkan tebing Waterfront Muare Ulakkan roboh dan pada akhirnya proyek tersebut dibatalkan dan ketua komisi IV DPRD Kalimantan Barat meminta Gubernur supaya dapat bertanggungjawab dan menganggarkan kembali pada tahun 2023.

"Setelah di monitoring kenyataan di lapangan, pekerjaan proyek berupa renovasi kawasan Waterfront Istana Alwatzikhobillah Sambas tersebut dengan nilai kontrak Rp8.826.828.000 pekerjaan yang dilakukan ini hancur lebur, hancurnya tebing Muare Ulakkan tersebut bukan karena bencana, namun karena kesalahan teknis dari kontraktor terjadi abrasi disebabkan kesalahan teknis" Ungkap Subhan Nur selaku ketua komisi IV DPRD Kalbar.

2. Adanya Dugaan Korupsi Pada Pembangunan

Dengan total anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp8,8 Miliar, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berhasil menetapkan empat orang tersangka pada tanggal 21 Juli 2023 atas kasus proyek pembangunan waterfront di Kabupaten Sambas. "Keempat orang ini baru ditetapkan sebagai tersangka dan belum dilakukan penahanan," terang Bambang selaku Aspidsus Kejati Kalbar. Ia mengatakan kerugian negara, berdasarkan hasil perhitungan dari inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berjumlah sekitar Rp1,8 miliar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, Pantja Edy Setiawan, saat dikonfirmasi oleh Suara Pemred pada Kamis (16/3/2023), Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi mangkraknya pembangunan kawasan Waterfront Istana Alwatzikhobillah di Kabupaten Sambas yang ditangani oleh Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati Kalbar dan masih dalam tahap pengumpulan data serta keterangan. Penyidik juga sudah bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti. Suara Pemred sendiri mendapatkan informasi melalui foto tentang adanya pekerjaan pembangunan Kawasan Waterfront Istana Alwatzikhobillah di Kabupaten Sambas yang tidak dilanjutkan.

Kasus pembangunan Kawasan Waterfront Istana Alwatzikhoebillah di Kabupaten Sambas menyoroti serangkaian permasalahan yang menghambat kelancaran proyek infrastruktur yang penting. Tindakan yang diambil dalam menangani permasalahan ini akan memiliki dampak cukup besar, baik bagi proyek waterfront itu sendiri maupun bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah. Pihak berwenang perlu bekerja sama dengan baik untuk memastikan bahwa perbaikan dilakukan pada proyek waterfront ini agar dapat dilanjutkan sesuai dengan standar teknis yang benar. Hal ini akan membantu Kabupaten Sambas mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan. Sementara itu, kasus dugaan korupsi yang terungkap perlu ditangani dengan tegas dan transparan. Ini adalah langkah penting dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Dengan

menegakkan keadilan dan akuntabilitas, kasus seperti ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk masa depan, menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak akan dibiarkan terjadi tanpa konsekuensi

KESIMPULAN

Permasalahan pembangunan di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang, tetapi masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Infrastruktur yang kuat adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi dan sumber daya listrik, masih menjadi isu penting. Investasi dalam infrastruktur yang tepat akan membantu meningkatkan mobilitas, akses ke layanan penting, dan kemampuan ekonomi.

Praktik korupsi dan tata kelola yang lemah adalah dua masalah yang saling terkait yang memiliki dampak serius pada pembangunan yang efisien dan transparan di suatu negara. Praktik korupsi sering kali menghasilkan ketidakmerataan dalam manfaat pembangunan. Proyek-proyek yang seharusnya menguntungkan masyarakat luas bisa saja hanya menguntungkan segelintir orang yang terlibat dalam tindakan korupsi. Korupsi menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi investor dan pelaku bisnis. Hal ini dapat menghambat investasi dalam ekonomi dan mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika tata kelola lemah, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat dan tidak efisien. Ini dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang penting dan mengakibatkan pemborosan sumber daya.

Kombinasi antara praktik korupsi dan tata kelola yang lemah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang efisien. Oleh karena itu, negara-negara dan pemerintah perlu secara serius berupaya untuk memerangi korupsi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Hal ini akan menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini melalui program-program seperti peningkatan infrastruktur, reformasi tata kelola, dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, upaya-upaya ini harus terus diperkuat dan diperluas untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua warga Indonesia. Kunci untuk mengatasi permasalahan ini adalah kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pihak internasional. Dengan komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan pembangunan, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, A. (2022). Efek spasial infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. *Akuntabel*, 19(2), 468–474. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.10934>
- Mutia Fajri Sirega, Anisah Nasution, Fitri Madinah, Zafira sabrina, & Maulida Ummi Zakia. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 52–62.

<https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.483>

- Mutiaraningrum, I., Evita, R., & Rosalina, T. (2021). The impact of the events on the improvement of community economy in the waterfront area sambas. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 7(3), 282. <https://doi.org/10.22334/jbhost.v7i3.298>
- NSS, R. L. P., Suryawardana, E., & Triyani, D. (2015). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 82. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>
- Putri, A. E. (2019). Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 4(2), 39. <https://doi.org/10.26737/jbki.v4i2.890>